

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN  
DI KOTA TANGERANG**

Oleh :

**RIZKY ILHAMI  
NPM : 170720130002**

**TESIS**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**PROGRAM PASCASARAJANA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
BANDUNG  
2015**

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KOTA TANGERANG

## Abstrak

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kota Tangerang berkaitan dengan subtema Pembangunan Sosial & Komuniti. Pemerintah Kota Tangerang membuat Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 yang berisi tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Peneliti mendapati sejumlah masalah yang berkaitan dengan mekanisme penarikan Retribusi Kebersihan yang dilakukan oleh DKP. Dalam kaitannya dengan teori Charles O. Jones pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan Kota Tangerang mencakup tiga aktivitas meliputi **organisasi, interpretasi dan aplikasi**.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian ditentukan dengan cara *Purposive Sampling*. Manfaat/kegunaan penelitian dalam hal ini diperuntukkan untuk perguruan tinggi, peneliti dan bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Tangerang.

Hasil penelitian adalah implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Tangerang belum dapat dikatakan efektif karena penataan struktur kurang diperhatikan oleh DKP, masih kurangnya pemahaman terhadap tujuan penarikan retribusi dan kurangnya sosialisasi, serta kurang optimalnya kemampuan pelaksana dalam melakukan penarikan retribusi kebersihan. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Saran dari peneliti adalah DKP melakukan perekrutan penarik retribusi sesuai tingkat pendidikannya, DKP memberikan pembekalan dan pelatihan khusus kepada penarik retribusi, DKP melakukan sosialisasi secara persuasif (ajakan) kepada masyarakat.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Retribusi, Persampahan/Kebersihan

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KOTA TANGERANG

## Pendahuluan

Pemungutan retribusi daerah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak guna membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah dan pelayanan masyarakat di daerah. Objek Retribusi Daerah dalam Pasal 108 UU No. 28 Tahun 2009, digolongkan ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.

Salah satu langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang adalah membuat Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Kebersihan, yang berisi tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Pada saat observasi awal di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Tangerang peneliti mendapati sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan implementasi PERDA No. 1 Tahun 2011 tentang mekanisme penarikan Retribusi Kebersihan yang dilakukan oleh DKP. Dalam kaitannya dengan teori Charles O. Jones pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan Kota Tangerang mencakup tiga aktivitas meliputi **organisasi**, **interpretasi** dan **aplikasi**.

Menurut Charles O. Jones, penyediaan sumberdaya dalam **organisasi** merupakan aktivitas organisasi yang sangat diperlukan guna mencapai suatu tujuan (*goals*). Berdasarkan Bab II Perda 1 tahun 2011 sumberdaya yang dimaksud adalah objek retribusi berupa petugas penarik retribusi persampahan/kebersihan. Permasalahan mengenai sumberdaya terjadi di dalam organisasi DKP dikarenakan tidak adanya petugas khusus yang bertugas sebagai penarik retribusi persampahan/kebersihan. Penarikan masih dilakukan oleh pegawai pengawas kebersihan sehingga tanggung jawab pegawai semakin besar. Selain itu, tidak tercantumnya tugas DKP sebagai penarik retribusi persampahan/kebersihan dalam SOTK DKP. Fenomena tersebut, menjelaskan bahwa tidak adanya aktivitas organisasi pelaksana kebijakan yang mencakup penataan struktur, kejelasan pembagian Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI), dan kemampuan sumberdaya manusia untuk menjadikan program DKP berjalan.

Selanjutnya, aktivitas **interpretasi** dilakukan untuk memproses penafsiran terhadap program yang sedang dijalani dan melakukan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan oleh para obyek dan subyek retribusi. Interpretasi menentukan efektivitas implementasi terutama kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemahaman, arahan dan petunjuk yang lengkap serta jelas sangat diperlukan untuk mampu menginterpretasikan dengan tepat. Namun pada kenyataannya pemahaman terhadap program penarikan retribusi persampahan/kebersihan tidak dilakukan dengan baik sehingga menyebabkan masih berlakunya Perwal No. 2 tahun 2003 Bab III Pasal 6 yang menyatakan bahwa wewenang dalam melaksanakan pemungutan retribusi dilakukan oleh Kecamatan dan Kelurahan melalui RT/RW.

**Aplikasi/** penerapan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan mencakup ketentuan rutin dari pelayanan tidak sesuai dengan tujuan program DKP tahun 2015 mengenai target retribusi persampahan/kebersihan sebesar 6,5 M yang dinilai memberatkan pelaksana kebijakan retribusi persampahan/kebersihan yaitu pegawai DKP. Disamping itu dari target potensi retribusi persampahan/kebersihan yang dibebankan tidak pernah tercapai, seperti tersaji dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.1 Data Capaian Target Retribusi Kebersihan/Persampahan**

NO	TAHUN	DASAR HUKUM	TARGET (Rp.)	CAPAIAN (Rp.)
1	2012	Kep.Wal No. 970/470-DPKD/2011	3.000.000.000	2.000.000.500
2	2013	Kep. Wal. No. 970/497-DPKD/2012	6.000.000.000	2.000.000.000
3	2014	Kep. Wal. No. 970/86-DPKD/2013	8.000.000.000	4.000.000.000

*Sumber: DPKD Kota Tangerang, 2015*

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Tangerang tidak efektif. Berdasarkan rumusan tersebut, peneliti membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Tangerang?

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan, menganalisis dan memberikan rekomendasi tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Tangerang.

## **Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, dimana data dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bugdon dan Taylor, dalam Moleong, 2005: 4), penelitian kualitatif berusaha melihat, mengetahui, serta menggambarkan fenomena tertentu terhadap suatu masyarakat berdasarkan apa adanya, sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Pendekatan kualitatif nantinya diharapkan dapat mengungkapkan peristiwa riil di lapangan dan metode kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian ini (Lincoln dan Guba, 1985:198). Tipe penelitian Deskriptif dipilih dalam penelitian ini karena dimaksudkan guna menggambarkan secara deskriptif tentang hal-hal apa saja yang berhubungan dengan implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Tangerang.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Sumber data Primer**

- Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti (Sugiyono, 2008: 157). Pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu melainkan disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan. Dan pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari.

- Observasi (pengamatan) secara langsung dengan sumber data

## b. Sumber data Sekunder

- Studi Kepustakaan  
Pengumpulan data ini diperoleh dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian yang dijalankan dan teknik ini berdasarkan *text books* maupun jurnal ilmiah.
- Studi Dokumentasi  
Teknik pengumpulan data ini diperoleh melalui peraturan menteri, catatan serta dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

## c. Penentuan Informan Penelitian

Informan penelitian ditentukan dengan cara *Purposive Sampling*. Sebelum penelitian dilaksanakan pendekatan komunikasi dan observasi untuk memilih para pihak yang layak dijadikan informan penelitian. Jumlah dan unsur informan penelitian adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Daftar Informan Penelitian dan Format Informasi**

<i>Kode key informan</i>	<i>Jabatan/pekerjaan</i>	<i>Peran Informan</i>	<i>Jumlah</i>
1	- Kepala Dinas DKP	Sebagai pimpinan yang bertanggung jawab dalam operasional dan administrasi	- 1 orang
2	- Sekretaris Dinas		- 1 orang
3	- Kepala Bidang Kebersihan		- 1 orang
4	- Kepala UPTD Pengelolaan Sampah		- 2 orang
5	- Bendahara Penerima Retribusi	Sebagai pegawai yang mengurus permasalahan retribusi kebersihan/persampahan.	- 1 orang
6.	- Kepala PD Pasar	Sebagai pimpinan yang bertanggung jawab dalam operasional dan administrasi	- 1 orang
7.	- Kepala Dinas PU		- 1 orang
8.	- Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah		- 1 orang
9.	- Penarik Retribusi persampahan/kebersihan	Sebagai penarik retribusi persampahan/kebersihan	- 2 orang
10.	Masyarakat	Sebagai pembayar retribusi kebersihan/persampahan	- 2 orang
<b><i>Jumlah</i></b>			<b><i>13 orang</i></b>

## 3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data meliputi antara lain: (Milles and Huberman, 1992: 16-20):

- a) Penarikan Kesimpulan
- b) Penyajian Data
- c) Reduksi Data

#### 4. Teknik Keabsahan Data

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penelitian agar hasil penelitian dapat dipercaya antara lain:

- a) Perpanjangan Keikutsertaan
- b) Triangulasi
- c) Kecukupan Referensial

#### 5. Lokasi Penelitian

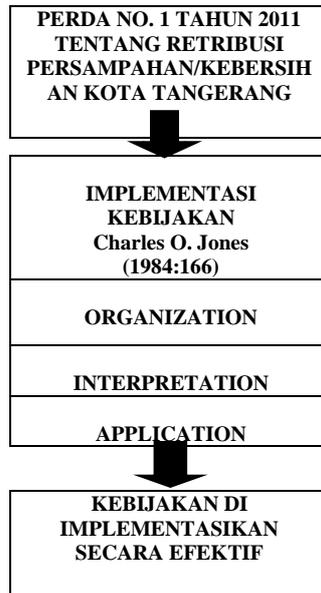
Seluruh rangkaian kegiatan penelitian dilakukan di Kota Tangerang Provinsi Banten lebih tepatnya dilakukan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang, Jalan Iskandar Muda No. 45 Neglasari Kota Tangerang 15129. No. Telp. / Fax. 021-55762574 / E-mail [dkp@tangerangkota.go.id](mailto:dkp@tangerangkota.go.id).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan model Charles O. Jones (1984:166), yang meliputi tiga pilar utama yaitu "*Organization, Interpretation, and Application*". Aktivitas *organisasi* dapat di kaji dari aspek penataan struktur, metoda, kemampuan sumberdaya, dan lingkungan. Selanjutnya, Aktivitas interpretasi (*interpretation*) dapat didalami dari aspek pemahaman terhadap tujuan, program, tupoksi, sosialisasi, dan sikap yang ditunjukkan oleh pelaksana kebijakan. Aktivitas aplikasi (*application*) dapat didalami dari aspek pengerahan sumberdaya, kemampuan pelaksanaan tugas, kerjasama antar *stakeholders*, dan partisipasi masyarakat.

Implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Tangerang harus mendapat dukungan partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat terhadap fungsi pelayanan yang diberikan pemerintah berupa partisipasi dalam hal mentaati pemerintah, membangun kesadaran, kepedulian terhadap peraturan yang berlaku, dan dapat juga berupa dukungan nyata dengan membantu secara langsung proses penyelenggaraan pelayanan umum, termasuk dalam membayar retribusi kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari kesesuaian antara pelaksanaan dengan tujuan, sasaran serta memberikan dampak positif bagi pemecahan masalah yang dihadapi, khususnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan demikian masalah implementasi kebijakan publik semakin jelas dan luas, artinya bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang memerlukan aktivitas komperhensif dari organisasi, interpretasi dan aplikasi. Berikut alur pikir implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Tangerang:

## Kerangka Pemikiran Gambar 1



### Dapatan

Situasi proses implementasi kebijakan menurut Jones memerlukan aktivitas komperhensif dari organisasi, interpretasi dan aplikasi maka hasil yang dapat disajikan sebagai berikut;

- **Organisasi**, perlu penataan kembali struktur organisasi secara terperinci sampai kepada unit-unit yang dapat mencapai tujuan implementasi kebijakan, intinya untuk mencapai tujuan (*goals*) pemerintah harus melakukan penghimpunan sumberdaya dan penyediaan sumberdaya. Agar organisasi efektif membutuhkan struktur dan kultur yang mampu beradaptasi, sehingga dapat memberikan respon yang cepat terhadap perubahan lingkungan (Jones, 1984:33). Dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Tangerang kurang memperhatikan penataan struktur organisasi untuk penarik retribusi sehingga penarik retribusi tidak tertera dalam struktur organisasi DKP Kota Tangerang, pernyataan disampaikan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan pertamanan yang diantaranya :

*“Sejauh ini petugas khusus penarik retribusi persampahan/kebersihan memang belum terdapat di dalam struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, tetapi petugas penarik retribusi sudah masuk kedalam Unit Pelaksana Tingkat Dinas (UPTD) pengelolaan sampah wilayah timur dan UPTD pengelolaan sampah wilayah barat. Dalam waktu dekat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor kebersihan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan akan membuat UPTD khusus untuk retribusi kebersihan Kota Tangerang”.*

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, untuk peningkatan pendapatan hasil daerah dibutuhkan pembentukan UPTD tersendiri yang khusus menangani retribusi agar retribusi kebersihan dapat tersedap maksimal. Selain penataan struktur kembali, diperlukan kemampuan sumberdaya keuangan dan kemampuan sumberdaya manusia. Untuk sumberdaya keuangan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yakin bahwa UPTD khusus dapat terbentuk. Berikut hasil wawancara dengan beliau :

*“Dengan APBD yang dimiliki Kota Tangerang saat ini DKP yakin dapat mengkomodir segala hal yang berkaitan dengan terbentuknya UPTD khusus*

*retribusi, hal ini semata-mata untuk meningkatkan PAD Kota Tangerang terutama sektor kebersihan sehingga untuk kedepannya Kota Tangerang dapat mempertahankan predikat sebagai salah satu Kota Terbersih di Indonesia”.*

Dari hasil wawancara tersebut terlihat jelas bahwa, keyakinan Kepala Dinas untuk terbentuknya UPTD khusus retribusi karena selain untuk mendorong peningkatan PAD, mempertahankan predikat sebagai Kota Terbersih di Indonesia juga menjadi alasan yang kuat terbentuknya UPTD retribusi.

Tetapi tidak untuk kemampuan sumberdaya manusia, dari tabel 1.3 terlihat bahwa untuk tingkat pendidikan pegawai DKP yang hanya lulusan SD sangat mendominasi situasi tersebut memprihatinkan karena tingkat pendidikan berpengaruh terhadap daya pikir seseorang dalam menangkap segala informasi dan arahan dari pimpinan.

**Tabel 1.3**  
**Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	9
2	S1	49
3	D3	5
4	SLTA	53
5	SLTP	19
6	SD	58
<b>Jumlah</b>		<b>193</b>

*Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2015*

Untuk itu diperlukan lingkungan organisasi yang solid untuk meminimalisir kesalahpahaman pegawai. Lingkungan organisasi di DKP sudah cukup baik terbukti dengan pembagian tugas yang sudah menggunakan prinsip bagi tugas sesuai dengan argumentasi sekretaris DKP yang di antaranya :

*“Kota Tangerang memiliki 13 kecamatan dan 105 kelurahan dengan demikian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang menempatkan seorang petugas penarik retribusi disetiap kelurahan. walaupun beban kerja yang dipikul masing-masing penarik retribusi berbeda-beda”*

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian penarik retribusi yang di tempatkan satu orang pada setiap kelurahan menunjukkan lingkungan yang kondusif dalam aktivitas penarikan retribusi walaupun di masing-masing kelurahan mempunyai beban kerja yang berbeda..

Dari aktivitas organisasi yang meliputi penataan struktur, kemampuan sumberdaya keuangan, sumberdaya manusia dan lingkungan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa walaupun penataan struktur kurang diperhatikan oleh DKP tetapi dari lingkungan organisasi dapat membantu untuk mengurangi keterbatasan pendidikan para pelaksana kebijakan retribusi kebersihan.

- **Interpretasi**, Kurangnya pemahaman TUPOKSI oleh para penarik retribusi dikarenakan minimnya pendidikan yang dimiliki oleh para penarik retribusi menyebabkan para penarik retribusi tidak mengerti apa yang harus dilakukan ketika berada di lapangan. Seperti yang disampaikan Sekretaris DKP;

*“Berjalan dengan baik, tetapi masih menemui kendala dalam hal keterbatasan kemampuan berpikir dikarenakan minimnya pendidikan yang di tempuh para personil.”*

Sehingga penyampaian program ke masyarakat pun menjadi tidak optimal. Meskipun pemerintah Kota Tangerang mengatakan telah melakukan berbagai sosialisasi mengenai penarikan retribusi tersebut. Bahkan Kepala DKP pun menambahkan:

*“DKP telah melakukan sosialisasi ke 13 kecamatan yang ada di Kota Tangerang. sosialisasi tersebut berbentuk penyuluhan yang berisi himbauan kepada masyarakat tentang PERDA retribusi.”*

Namun pada kenyataannya, masyarakat masih belum mengerti karena kurangnya penjelasan yang diberikan oleh penarik retribusi. Pernyataan ini didukung oleh Roy, warga kecamatan Tangerang:

*“Saya kurang mengerti apa yang dijelaskan penarik retribusi mengenai prosedur penarikan retribusi. Ketika saya memberikan pertanyaan kepada penarik retribusi, dia tidak terlalu menguasai pembahasan yang telah dijelaskannya sendiri.”*

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang melalui Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyikapinya dengan mengatakan:

*“DKP sedang berusaha untuk dapat merealisasikan pembekalan dan pelatihan bagi penarik retribusi tapi belum dapat dilakukan dalam waktu dekat dikarenakan pemerintah kota sedang memfokuskan diri dalam hal terbentuknya UPTD khusus retribusi kebersihan. Setelah terbentuk UPTD, maka dapat dimungkinkan pembekalan dan pelatihan dapat dilaksanakan”.*

Selain itu, pemerintah Kota Tangerang juga melakukan kerjasama dengan dinas lain agar dapat mengoptimalkan kinerja penarik retribusi dalam melaksanakan penarikan retribusi. Seperti yang dipaparkan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan:

*“Dalam hal ini DKP akan terus bekerja sama dengan Dinas lain untuk mengoptimalkan retribusi persampahan/kebersihan seperti kerja sama yang dilakukan DKP dan Dinas Pekerjaan Umum untuk menyediakan TPS (tempat pembuangan sampah) di setiap kelurahan”.*

Dari pernyataan diatas terlihat masih kurangnya pemahaman terhadap tujuan penarikan retribusi yang dilakukan DKP. Selain itu, kurangnya sosialisasi ke masyarakat dikarenakan minimnya penjelasan yang dilakukan penarik retribusi di setiap kelurahan/ desa sehingga penyampaian informasi yang diperoleh tidak dapat dipahami dengan baik.

- **Aplikasi**, berkaitan dengan pengerahan sumberdaya yang ada, pemerintah Kota Tangerang berupaya melakukan sistem monitoring agar kebijakan retribusi kebersihan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 1 Tahun 2011. Kepala UPTD wilayah Barat mengatakan:

*“Sistem monitoring dilakukan oleh pihak DKP sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar. Dalam hal ini dilakukan oleh kepala UPTD pengelolaan sampah wilayah timur dan wilayah barat dengan membuat laporan setiap minggunya kepada pimpinan.”*

Sistem monitoring yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan tersebut memungkinkan pemerintah daerah Kota Tangerang untuk menemukan potensi-potensi baru yang dapat dijadikan sebagai retribusi daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah bekerjasama dengan dinas-dinas lainnya. Seperti yang diungkapkan Kepala UPTD wilayah Timur;

*“Sejauh ini, salah satu langkah DKP untuk menemukan potensi retribusi baru dengan cara melakukan koordinasi dengan Dinas lainnya. Sebagai caontoh, koordinasi dengan Dinas Perizinan dimana Dinas Perizinan memberikan data lahan-lahan retribusi baru yang ada di Kota Tangerang seperti perumahan baru di dalam kota, mall, dan sebagainya.”*

Dengan menemukan potensi-potensi retribusi baru, semakin banyak pula oknum yang tidak bertanggung jawab dan melakukan kecurangan dalam pelaksanaannya. Tindakan tegas pun akan dilakukan pemerintah daerah bila didapati oknum yang melakukan kecurangan. Kepala DKP menambahkan;

*“Tindakan tegas pasti dilakukan bila ada oknum yang terbukti melakukan pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan biasanya hanya diberi surat peringatan. Namun apabila yang dilakukan adalah pelanggaran berat maka dapat diberhentikan secara tidak hormat oleh DKP.”*

Walaupun terdapat sanksi yang tegas dalam melaksanakan penarikan retribusi namun, tetap saja masih ada oknum-oknum yang melakukan kecurangan tersebut. Seperti yang dituturkan oleh Neni sebagai perwakilan dari wajib retribusi kebersihan Kota Tangerang;

*“Masih banyak penarik retribusi yang meminta uang retribusi secara tidak wajar. Melebihi nominal yang sudah ditentukan oleh RT/ RW setempat.”*

Untuk mencegah kecurangan terus terjadi, pemerintah daerah menginginkan adanya dukungan partisipasi dari masyarakat dalam hal kepedulian terhadap peraturan yang berlaku. Kepala DKP mengemukakan pendapatnya:

*“DKP selalu mengajak masyarakat untuk turut serta berpartisipasi. Dengan membayar retribusi, masyarakat dianggap telah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan program pemerintah sehingga Kota Tangerang dapat mempertahankan predikatnya sebagai salah satu Kota Terbersih di Indonesia. Selain itu, masyarakat juga dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang.”*

Dilihat dari hasil penelitian mengenai aktivitas aplikasi, dapat disimpulkan bahwa kurang optimalnya kemampuan pelaksana dalam melakukan penarikan retribusi kebersihan dikarenakan masih adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan pada saat di lapangan. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya menjadikan implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 1 Tahun 2011 belum efektif.

### **Diskusi & Penutup**

Manfaat/kegunaan penelitian dalam hal ini diperuntukkan untuk perguruan tinggi dalam memacu pelaksanaan yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya dalam bidang Ilmu Kebijakan Publik. Dapat berguna juga bagi pengembangan teoritis keilmuan, maupun penalaran disiplin Ilmu Kebijakan Publik yang berkaitan dengan pelaksanaan dari sebuah Kebijakan Publik. Selain itu, sebagai media pembelajaran bagi peneliti dan bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam melaksanakan kebijakan retribusi persampahan/kebersihan.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian implementasi kebijakan retribusi persampahan/kebersihan diantaranya:

- Muhammad Andi Wahyudi (2014) Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan retribusi persampahan/kebersihan di Kabupaten Sidoarjo (studi pada pelaksanaan Perda NO. 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan). Teori utama yang digunakan mencakup 6 variabel model analisis Van Matter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya manusia, keuangan dan waktu, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas dan pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik masih terdapat kendala seperti tidak tercapainya target pendapatan retribusi sampah, minimnya kesadaran masyarakat dan kurangnya petugas penarik retribusi.
- Iin Indah Sari (2012) melakukan penelitian tentang implementasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2002 tentang pengelolaan persampahan/kebersihan di TPA Jatiwaringin oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kabupaten Tangerang. Teori yang digunakan berdasarkan pada variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan.
- Arnia Fajarwati (2007) melakukan penelitian tentang Analisis faktor-faktor dalam implementasi kebijakan pelayanan sampah di Kota Bandung dengan teori utama dari Edward III yang menggunakan 4 indikator yakni komunikasi, sumber-sumber, disposisi dan struktur birokrasi.

Dari hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat sejumlah perbedaan dalam penelitian penulis diantaranya adalah objek penelitian, peneliti memilih objek penelitian Kota Tangerang. Kemudian, peneliti lebih memfokuskan pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan Kota Tangerang sebagai fokus utama. Teori utama yang dijadikan rujukan pun berbeda, yaitu menggunakan pisau analisis dari teori Charles. O. Jones yang dipandang relevan dengan fenomena atau permasalahan mengenai retribusi persampahan di Kota Tangerang, yakni mencakup tiga aktivitas meliputi organisasi, interpretasi dan aplikasi.

Dari seluruh hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Tangerang belum dapat dikatakan efektif jika didasarkan pada kegiatan **organisasi, interpretasi dan aplikasi** secara komprehensif. Dari segi **organisasi**, penataan struktur kurang diperhatikan oleh DKP tetapi dari lingkungan organisasi dapat membantu untuk mengurangi keterbatasan pendidikan para pelaksana kebijakan retribusi kebersihan. Dari segi **interpretasi**, masih kurangnya pemahaman terhadap tujuan penarikan retribusi yang dilakukan DKP. Selain itu, kurangnya sosialisasi ke masyarakat dikarenakan minimnya penjelasan yang dilakukan penarik retribusi di setiap kelurahan/ desa sehingga penyampaian informasi yang diperoleh tidak dapat dipahami dengan baik. Dan dari segi **aplikasi**, kurang optimalnya kemampuan pelaksana dalam melakukan penarikan retribusi kebersihan dikarenakan masih adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan pada saat di lapangan. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya menjadikan implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 1 Tahun 2011 belum efektif.

Implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Tangerang akan efektif apabila:

- DKP dapat lebih meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama di bidang pendidikan dengan cara melakukan perekrutan penarik retribusi sesuai tingkat pendidikannya.
- DKP memberikan pembekalan dan pelatihan khusus kepada penarik retribusi agar dapat menyiasati permasalahan yang dihadapi di lingkungan masyarakat. Selain itu dengan pembekalan tersebut, diharapkan penarik retribusi dapat menyosialisasikan peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Tangerang.
- DKP melakukan sosialisasi secara persuasif (ajakan) kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan penarikan retribusi. Ajakan tersebut dapat melalui iklan atau reklame di jalan sekitar Kota Tangerang. Dapat juga dengan melakukan sosialisasi secara berkala di kesempatan tertentu seperti Car Free Day (CFD) Kota Tangerang.

### **Penghargaan**

Suatu kebanggaan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang telah meridhoin peneliti dalam menulis penelitian ini.
2. Ayahanda Dr. Rachmat Hadis, M.Si dan Ibunda Hj. Denny Heryani, M.Pd, merupakan motivator terbesar dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Arry Bainus M.A selaku Dekan FISIP Universitas Padjadjaran.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Budiman Rusli M.S selaku Ketua Jurusan Kebijakan Publik Pascasarjana FISIP Universitas Padjadjaran sekaligus Dosen Pembimbing I.
5. Ibu Dra. Mudyati Rahmatunnisa, M.A., Ph.D selaku Wakil Dekan I FISIP Universitas Padjadjaran sekaligus Dosen Pembimbing II.

### **Rujukan**

- Jones, Charles O. 1984. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Monterey, California : Brooks/Cole Publishing Company.
- Miles, B.B., dan A.M. Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, UI Press Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.

### **Dokumen pendukung :**

Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Kebersihan Kota Tangerang  
 Profil Kota Tangerang 2014  
 Kota Tangerang dalam Angka 2015